



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PRT/M/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi keyakinan memadai terselenggaranya kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperlukan pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan

lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 466);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Unit Kerja adalah unit organik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setingkat eselon II.

5. Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, dan Loka.
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri bertujuan untuk:
 - a. Menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kegiatan di Unit Organisasi; dan
 - b. Memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta dokumen yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan SPIP.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kewenangan pengendalian;
- b. kelembagaan SPIP;
- c. penyelenggaraan SPIP;
- d. pelaporan; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern atas

penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SPIP.

Pasal 5

- (1) Unit Organisasi menerapkan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penyelenggaraan SPIP pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektur Jenderal/Sekretaris Badan terkait.
- (3) Penyelenggaraan SPIP pada Sekretariat Jenderal dikoordinasikan oleh Kepala Biro Keuangan.

BAB III

KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:

- a. satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP kementerian; dan
- b. satuan tugas koordinasi penyelenggaraan SPIP unit organisasi.

Pasal 7

Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 8

- (1) Pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;
- (2) Susunan dan tugas Satuan Tugas Koordinasi Penyelenggaraan SPIP pada Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi yang diketuai oleh:
 - a. kepala biro keuangan untuk sekretariat jenderal kementerian;
 - b. sekretaris inspektorat jenderal untuk inspektorat jenderal;
 - c. sekretaris direktorat jenderal untuk direktorat jenderal; dan
 - d. sekretaris badan untuk badan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di masing-masing Unit Organisasinya;
- (2) Pimpinan Unit Kerja/UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing Unit Kerja/UPT.

Pasal 10

Tata Cara penyelenggaraan pelaksanaan SPIP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP diperlukan laporan Penyelenggaraan SPIP sebagai bentuk pertanggung jawaban yang berisi tentang:
 - a. pelaksanaan kegiatan dari awal hingga akhir;
 - b. hambatan yang dihadapi;
 - c. saran perbaikan; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Setiap pimpinan Unit Organisasi menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing Unit Organisasi dan disampaikan ke Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian dan menyampaikan kepada Menteri paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Dalam menyusun laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Kerja/UPT yang menjadi atasan langsung satuan kerja melakukan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan SPIP dengan satuan kerja yang berada dibawah koordinasinya.

- (5) Format laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta akuntabilitas keuangan negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Jenderal dapat berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asistensi, konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, maupun kegiatan pembinaan lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

MENTERI PEKERJAAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

